

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

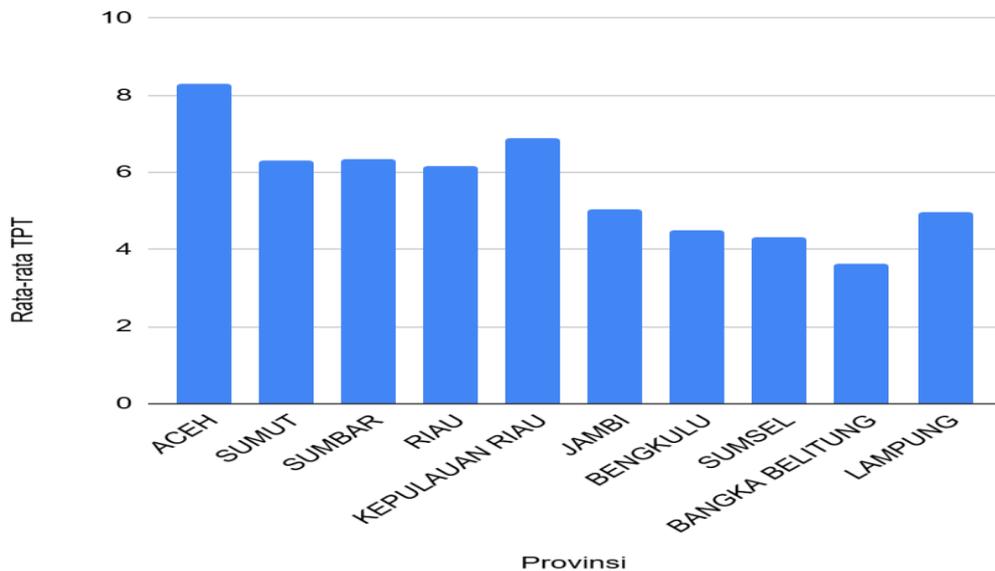
Indonesia memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara, yang merupakan peluang signifikan bagi pembangunan negara. Namun, jika populasi yang besar tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan berbagai kesulitan di masa depan, salah satunya adalah manajemen kependudukan di sektor ketenagakerjaan, terutama dalam isu pengangguran (Anjani et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi belum berhasil memperluas kesempatan kerja yang sepadan dengan laju pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahunnya (Wahab, 2022).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah seperangkat program yang dimaksudkan untuk menaikkan standar hidup, memberikan prospek pekerjaan, dan menjamin distribusi pendapatan yang lebih adil. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk menghasilkan kemakmuran jangka panjang bagi semua segmen masyarakat. Tidak hanya itu, Pembangunan ekonomi berperan penting dalam menstabilkan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan tangguh, serta mengurangi ketimpangan sosial (Astuti et al., 2019).

Pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur sebagian dengan melihat tingkat penganggurannya. Status kesejahteraan masyarakat sering tercermin dalam tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan kesetaraan pendapatan tercermin dalam tingkat pengangguran yang rendah, yang meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak optimal (Anjani et al., 2023).

Masalah pengangguran merupakan salah satu isu fundamental dalam pembangunan ekonomi yang senantiasa menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tinggi dapat mencerminkan tidak terserapnya angkatan kerja secara optimal, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta ketidakefektifan strategi Pembangunan dan dapat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga tingkat pengangguran meningkat.

Rata-rata TPT tahun 2009-2023



Gambar 1. 1 Rata-Rata Tingkat Pengangguran di Pulau Sumatera

Sumber: BPS (sakernas berbagai edisi) (Data diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Berdasarkan data rata-rata TPT pulau Sumatera per provinsi selama periode 2009 hingga 2023, terdapat variasi signifikan antarwilayah.

Provinsi Aceh menempati posisi tertinggi dengan rata-rata TPT lebih dari 8%, menandakan bahwa provinsi ini secara konsisten mengalami persoalan dalam menyerap tenaga kerja selama satu setengah dekade terakhir. Kondisi ini dapat disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang masih sangat bergantung pada sektor publik serta minimnya pengembangan sektor industri dan swasta yang mampu menciptakan lapangan kerja skala besar.

Pada provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau mencatat rata-rata TPT pada kisaran 6–7%. Meskipun wilayah-wilayah ini memiliki potensi ekonomi besar seperti industri pengolahan, perdagangan lintas batas, serta sektor energi dan pertambangan, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan bahwa peluang kerja yang tersedia belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Hal ini mencerminkan

tantangan struktural dalam sistem ketenagakerjaan dan perlunya efisiensi distribusi investasi.

Di sisi lain Provinsi Jambi menempati posisi ke-6 TPT tertinggi, dengan rata-rata TPT sebesar 5,03%. Angka ini lebih tinggi dibanding beberapa provinsi tetangganya di Sumatera, seperti Sumatera Selatan (4,31%) dan Bengkulu (4,51%), namun masih di bawah provinsi seperti Sumatera Utara (6,31%) dan Kepulauan Riau (6,88%).

Berdasarkan grafik rata-rata TPT provinsi di Pulau Sumatera tahun 2009–2023, Provinsi Jambi tidak menempati posisi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Akan tetapi, ketika ditinjau lebih dalam terhadap jumlah penganggur secara absolut dari tahun ke tahun, Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut yang menyajikan data jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama periode 2009 - 2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengangguran Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2023

Tahun	Jumlah Pengangguran (Jiwa)
2009	73.904
2010	83.278
2011	60.169
2012	47.296
2013	70.361
2014	79.784
2015	70.349
2016	67.671
2017	66.816
2018	69.075
2019	73.965
2020	93.990
2021	93.754
2022	86.459
2023	85.576

Sumber: (BPS Prov Jambi, 2015, 2024b)

Berdasarkan jumlah pengangguran di Provinsi Jambi selama tahun 2009 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2009, jumlah

penganggur tercatat sebanyak 73.904 jiwa, dan angka ini terus menurun hingga mencapai titik terendah sebesar 47.296 jiwa pada tahun 2012. Namun, mulai tahun 2013 hingga 2014, jumlah pengangguran kembali meningkat secara signifikan, yaitu mencapai 70.361 jiwa pada 2013 dan 79.784 jiwa pada 2014. Kondisi ini mengindikasikan adanya dinamika dalam penyerapan tenaga kerja yang belum stabil. Selanjutnya, pada periode 2015 hingga 2019, jumlah penganggur bergerak naik turun di kisaran 70.349 ribu hingga 73.965 ribu jiwa.

Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan 2021, seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi, menyebabkan terjadinya PHK dan pembatasan lapangan kerja. Pada tahun 2020, jumlah pengangguran di Jambi mencapai angka tertinggi yaitu 93.990 jiwa. Meskipun demikian, dalam dua tahun terakhir, yakni 2022 dan 2023, jumlah penganggur kembali menurun menjadi sekitar 85.576 ribu jiwa. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun awal dekade sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran di Provinsi Jambi masih menjadi isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat Provinsi Jambi merupakan daerah yang sedang berkembang secara ekonomi, terutama di sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung seharusnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja.

Serta Pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dapat memberikan peluang menambah lapangan pekerjaan baru yang memungkinkan lebih banyak individu untuk memperoleh pekerjaan (Astuti et al., 2019).

Berbagai aspek ekonomi akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, dan kinerja ekonomi sektor-sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah contoh keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah seperti kemiskinan dan pengangguran (Marcal et al., 2024). Data mengenai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dalam 15 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2009-2023

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB(miliar)
2009	84.477,00
2010	90.618,41
2011	97.740,87
2012	104.615,08
2013	111.766,13
2014	119.991,44
2015	125.037,40
2016	130.501,13
2017	136.501,71
2018	142.902,00
2019	149.111,09
2020	148.354,25
2021	153.850,60
2022	161.730,00
2023	169.268,80

Sumber: (BPS Prov Jambi, 2024a)

Tabel 1.2 Tabel di atas menunjukkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Provinsi Jambi dari tahun 2009 hingga 2023. Secara umum, PDRB menunjukkan tren mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah secara nominal.

Pada tahun 2009, nilai PDRB Provinsi Jambi tercatat sebesar Rp84.477,00 miliar, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2010 menjadi Rp90.618,41 miliar, yang dapat diartikan sebagai hasil dari pemulihan ekonomi pascakrisis global tahun 2008 dan didorong oleh peningkatan harga komoditas. Setelah itu, pertumbuhan PDRB cenderung stabil dengan peningkatan rata-rata setiap tahunnya.

Peningkatan PDRB terus berlanjut hingga mencapai Rp149.111,09 miliar pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi Rp148.354,25 miliar, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Setelah tahun 2020, nilai PDRB kembali mengalami peningkatan, menandakan adanya pemulihan ekonomi. Pada tahun 2021, PDRB mencapai Rp153.850,60 miliar, dan terus naik menjadi Rp169.268,80 miliar pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, tren data ini menggambarkan bahwa perekonomian Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang cukup stabil, meskipun sempat terdampak oleh pandemi. Peningkatan PDRB ini mencerminkan semakin besarnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja.

Selain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, karena dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga semakin bertambah. Hal ini akan menimbulkan pengangguran jika penduduk yang semakin bertambah tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah kesempatan kerja (Tamba & Hukom, 2024). Pertumbuhan populasi terlalu cepat dapat memperlambat proses pembangunan. Hal ini karena pertumbuhan penduduk dapat mencerminkan kondisi demografis suatu wilayah (Marliana, 2022).

Studi sebelumnya oleh Baihawafi & Sebayang (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Penelitian Astuti et al. (2019) Tingkat pengangguran secara signifikan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang menunjukkan jika jumlah penduduk bertambah maka akan menurunkan jumlah pengangguran.

Pada negara berkembang umumnya laju peningkatan jumlah penduduk lebih besar dari lapangan kerja yang ada. Akibatnya, tidak semua tenaga kerja berhasil mendapatkan pekerjaan. Data yang didapatkan dari BPS Provinsi Jambi mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi dalam 15 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2009	2.834,2	1,99
2010	3.092,3	2,56
2011	3.167,6	2,25
2012	3.227,1	2,07
2013	3.286,1	1,83
2014	3.344,4	1,77
2015	3.402,1	1,72
2016	3.458,9	1,67
2017	3.515,0	1,62
2018	3.570,3	1,57
2019	3.624,6	1,52
2020	3.548,2	-2,11
2021	3.585,1	1,04
2022	3.631,1	1,28
2023	3.679,2	1,32
Rata-rata		1,47

Sumber: (BPS Prov Jambi, 2023a) (Data diolah)

Tabel 1.3 diatas menggambarkan Jumlah penduduk Provinsi Jambi tahun 2009-2023 yang berfluktuasi. jumlah penduduk Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2009 hingga 2023. Di 2009, penduduk tercatat sekitar 2.834,2 ribu jiwa, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 3.679,2 ribu jiwa pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya tren pertumbuhan demografis yang stabil di wilayah tersebut, meskipun laju pertumbuhannya menunjukkan penurunan secara bertahap.

Pertumbuhan penduduk pada awal dekade cukup tinggi, yakni 2,56% pada tahun 2010, namun mengalami tren penurunan hingga mencapai 1,32% pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan selama 2010–2023 adalah sekitar 1,47% per tahun. Penurunan pertumbuhan ini merupakan fenomena umum yang kerap terjadi seiring

meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran keluarga berencana, dan urbanisasi. Penurunan yang agak tinggi juga diamati pada tahun 2020 (-2,11%), yang dapat dikaitkan dengan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap migrasi dan dinamika penduduk.

Meskipun terdapat fluktuasi kecil pada laju pertumbuhan, pola keseluruhannya menunjukkan stabilitas yang relatif baik. Tidak terdapat tahun dengan lonjakan atau penurunan ekstrem dalam jumlah penduduk, yang menandakan bahwa Provinsi Jambi memiliki kondisi demografis yang cenderung stabil, tanpa gangguan besar dari faktor eksternal seperti migrasi masif atau bencana besar.

Secara keseluruhan, Provinsi Jambi menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang positif. Hal ini menjadi sinyal bagi pembuat kebijakan untuk mulai memperhatikan isu-isu jangka panjang seperti penyediaan lapangan kerja, kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan urbanisasi yang berkelanjutan. Dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat, perencanaan pembangunan daerah bisa dilakukan dengan lebih terukur dan efektif.

Meningkatnya tingkat investasi adalah salah satu faktor paling penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, investasi merupakan hal yang krusial untuk menggapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mencapai pembangunan nasional. Permintaan barang modal dan kemampuan untuk menyerap lebih banyak pekerja keduanya dipengaruhi oleh investasi. Yang pertama meningkatkan permintaan, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas pendapatan dan permintaan (Sukirno, 2016).

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi dengan beragam sumber daya alam, tidak diragukan lagi memiliki potensi investasi yang strategis. serta memiliki sejumlah sumber daya alam potensial yang kemungkinan akan menarik aktivitas investasi yang signifikan baik dari PMDN maupun PMA. Tingkat investasi PMDN di Provinsi Jambi ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 4 Perkembangan Investasi PMDN di Provinsi Jambi Periode 2009-2023

Tahun	Total Investasi (miliar rupiah)	Perkembangan (%)
2009	80.488,26	–
2010	96.116,08	19,42%
2011	144.330,96	50,16%
2012	199.336,76	38,11%
2013	251.702,67	26,27%
2014	284.181,85	12,90%
2015	319.967,09	12,59%
2016	358.811,09	12,14%
2017	426.068,48	18,74%
2018	312.822,58	-26,58%
2019	443.738,20	41,85%
2020	351.167,72	-20,86%
2021	620.419,39	76,67%
2022	888.265,92	43,17%
2023	1.040.498,94	17,14%
Rata- Rata		22,98%

Sumber: (BPS Prov Jambi, 2023b) (data diolah)

Dari Tabel 1.4 terlihat bahwa total investasi di Provinsi Jambi menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada periode awal, tercatat peningkatan yang konsisten, dimulai dari tahun 2009 dengan total investasi berjumlah Rp 80.488,26 dan terus naik pada tahun 2016 sebesar Rp 358.811,09. Kenaikan ini menggambarkan adanya perkembangan iklim investasi yang cukup kondusif di Provinsi Jambi, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dalam menarik investor.

Fluktuasi masih terjadi di tahun-tahun berikutnya dengan nilai investasi meningkat pada tahun 2019 di angka Rp 443.738,20, namun menurun kembali di tahun 2020 ke 351.167,72 atau sebesar -20,86 % yang dapat disebabkan oleh pandemi, lalu naik signifikan dari tahun 2021 ke Rp 620.419,39, dan terus meningkat menjadi Rp 888.265,92 pada tahun 2022 serta di 2023 relatif stagnan dengan jumlah investasi sebesar Rp 1.040.498,94 atau meningkat 17,14% dari tahun sebelumnya. Rata-rata investasi tumbuh sekitar 22,98% per tahun.

Pendirian beberapa sektor baru merupakan hasil langsung dari investasi, menjadikannya salah satu kekuatan pendorong di balik perekonomian setiap negara. Aliran modal masuk dan pembiayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional. Karena semakin banyak industri baru yang berkembang, tingkat retensi tenaga kerja akan meningkat, sehingga mengurangi pengangguran. Hal ini terutama terlihat pada perusahaan yang sangat padat karya atau sangat padat modal, karena mereka cenderung berinvestasi lebih awal dan menghasilkan lebih banyak, sehingga menghasilkan lebih banyak peluang kerja (Jeon et al., 2023).

Investasi dapat menciptakan peluang kerja melalui pembangunan sektor-sektor produktif yang menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2024, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jambi pada mencapai Rp1,30 triliun. Meskipun jumlah ini masih tergolong kecil dibandingkan provinsi seperti Riau (Rp88,30 triliun) dan Sumatera Utara (Rp22,44 triliun), Provinsi Jambi mampu mencatat TPT yang lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi tersebut.

Untuk memperkuat konteks, berikut data perbandingan indikator makroekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatra pada tahun 2024:

Tabel 1. 5 Kondisi Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2024

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi /PDRB (Triliun)	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	Nilai Investasi dalam negeri (Triliun Rp)	Jumlah Pengangguran (Jiwa)
Aceh	65,360	5,55	2,13	152,950
Sumatera Utara	295,772	15,78	22,44	458,136
Sumatera Barat	332,940	5,83	0,088	178,250
Riau	289,250	6,73	88,30	121,000
Kepulauan Riau	352,440	2,27	10,02	68,900
Jambi	322,980	3,72	1,30	86,075
Bengkulu	103,990	2,11	0,73	35,343
Sumatera Selatan	663,960	8,89	36,67	180,000
Bangka Belitung	107,500	1,53	15,83	37,200
Lampung	483,883	9,05	5,44	209,167

Sumber: BPS (sakernas berbagai edisi)

Tabel di atas menyajikan gambaran kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatra pada tahun 2024. Data yang disajikan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (dalam triliun rupiah), jumlah penduduk (dalam juta jiwa), nilai investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan jumlah pengangguran (dalam satuan jiwa). Keempat variabel ini menjadi indikator penting dalam melihat dinamika pembangunan ekonomi dan sosial di suatu wilayah.

Provinsi Jambi menunjukkan nilai PDRB sebesar Rp322,98 triliun, yang tergolong menengah di antara provinsi-provinsi lainnya. PDRB Jambi lebih tinggi dari Bengkulu (Rp103,99 triliun), Bangka Belitung (Rp107,50 triliun), dan Aceh (Rp65,36 triliun), namun masih berada di bawah Sumatera Selatan (Rp663,96 triliun) dan Lampung (Rp483,88 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa Jambi

memiliki aktivitas ekonomi yang cukup signifikan dan potensial untuk dianalisis lebih lanjut.

Dari sisi jumlah penduduk, Jambi tercatat memiliki sekitar 3,72 juta jiwa, menjadikannya salah satu provinsi dengan jumlah penduduk menengah di Pulau Sumatera. Jumlah ini lebih besar dari Kepulauan Riau (2,27 juta jiwa) dan Bangka Belitung (1,53 juta jiwa), namun lebih kecil dari provinsi seperti Sumatera Utara (15,78 juta jiwa) atau Lampung (9,05 juta jiwa). Jumlah penduduk yang sedang ini menciptakan tantangan tersendiri dalam hal penyediaan lapangan kerja dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Dalam hal investasi, Provinsi Jambi hanya mencatatkan nilai investasi PMDN sebesar Rp1,30 triliun, yang tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Riau (Rp88,30 triliun), Sumatera Selatan (Rp36,67 triliun), dan Sumatera Utara (Rp22,44 triliun). Bahkan, provinsi dengan jumlah penduduk lebih kecil seperti Kepulauan Riau mampu menarik investasi sebesar Rp10,02 triliun. Rendahnya nilai investasi di Jambi dapat mengindikasikan kurangnya daya tarik bagi investor dalam negeri, atau kendala-kendala struktural seperti infrastruktur, regulasi, dan kesiapan tenaga kerja.

Pendirian beberapa sektor baru merupakan hasil langsung dari investasi, menjadikannya salah satu kekuatan pendorong di balik perekonomian setiap negara. Aliran modal masuk dan pembiayaan memainkan peran penting dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB) nasional. Karena semakin banyak industri baru yang berkembang, tingkat retensi tenaga kerja akan meningkat, sehingga mengurangi pengangguran. Hal ini terutama terlihat pada perusahaan yang sangat padat karya atau sangat padat modal, karena mereka cenderung berinvestasi lebih awal dan menghasilkan lebih banyak, sehingga menghasilkan lebih banyak peluang kerja (Jeon et al., 2023).

Dari sisi nilai investasi dalam negeri, Provinsi Jambi mencatatkan angka sebesar Rp1,30 triliun, yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan sebagian besar provinsi lain di Pulau Sumatera. Beberapa provinsi seperti Riau (Rp88,30 triliun), Sumatera Selatan (Rp36,67 triliun), bahkan Bangka Belitung (Rp15,83 triliun) memiliki angka investasi jauh lebih tinggi. Namun, menariknya, meskipun dengan nilai investasi yang kecil, Provinsi Jambi mampu mencatatkan jumlah

pengangguran yang relatif lebih rendah, yaitu 86.075 jiwa, dibandingkan beberapa provinsi lain yang memiliki investasi lebih tinggi tetapi tingkat penganggurannya justru lebih besar, seperti Lampung (Rp5,44 triliun; 209.167 jiwa). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas investasi dalam negeri di Provinsi Jambi dalam menyerap tenaga kerja terbilang cukup baik,

Dengan memperhatikan keempat indikator tersebut, Provinsi Jambi berada dalam posisi yang cukup unik pertumbuhan ekonominya sedang, jumlah penduduknya tidak terlalu besar, investasinya rendah, namun Jumlah penganggurannya termasuk moderat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh satu faktor saja. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara empiris sejauh mana pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan investasi dalam negeri berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jambi.

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Nilai Investasi dalam negeri Terhadap Jumlah Pengangguran di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dinamika pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk, Nilai investasi dalam negeri dan Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2009 - 2023 ?
- b. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk dan Nilai investasi dalam negeri terhadap Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi 2009 – 2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dinamika pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk, Nilai investasi dalam negeri dan Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2009 - 2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Jumlah penduduk dan Nilai investasi dalam negeri terhadap Jumlah pengangguran di Provinsi Jambi 2009 - 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan sebuah ilmu sebagai berikut:

a. **Manfaat Akademis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan peningkatan jumlah pengangguran, khususnya di Jumlah Provinsi Jambi.

b. **Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi Jumlah pengangguran